

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	1
---	---	---	---

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Suara Merdeka
Media Online	.....

Wilayah: Kabupaten Wonosobo

Halaman 14

## Pembangunan Pasar Sapuran tidak Jelas

**WONOSOBO** - Kelanjutan pembangunan Pasar Sapuran makin tidak jelas. Dana sebesar Rp 11 miliar yang dianggarkan untuk kelanjutan pembangunan tahun 2021 gagal cair karena proyek pembangunan pasar tersebut gagal lelang.

Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Wonosobo, Suprayitno mengatakan, pembangunan Pasar Sapuran dimulai pada tahun 2017. Untuk membangun Pasar Sapuran hingga rampung memerlukan biaya sebesar Rp 25 miliar.

"Kalau dananya ada bisa langsung selesai, dan bisa langsung ditempati para pedagang. Namun ternyata dananya yang keluar itu ngicrit," terang Suprayitno.

Pada tahun 2017 anggaran yang turun hanya Rp 6 miliar. Kemudian tahun 2018 cuma Rp 4 miliar. Sementara pada tahun 2019 tidak ada anggaran untuk kelanjutan pembangunan pasar tersebut. Lalu tahun 2020 ada tambahan anggaran cuma Rp 5 miliar.

"Jadi totalnya saat ini baru Rp 15 miliar. Nah, di tahun 2021 ini, sebenarnya sudah ada tapi malah gagal lelang," ujarnya ditemui di kantornya, kemarin.

Pihaknya tidak membicarakan lebih jauh terkait alasan kenapa gagal lelang pembangunan Pasar Sapuran. Namun dia menilai hal tersebut sangat disayangkan mengingat Pasar Sapuran ini menjadi salah satu roda perputaran ekonomi masyarakat sekitar.

"*Jane yo eman-eman*. Tapi bagaimana lagi. Hanya saya sudah matur ke Pak Bupati agar tahun 2022 bisa kembali dianggarkan," ujarnya.

Dalam proses pembangunan Pasar Sapuran Wonosobo itu, para pedagang masih ditempatkan di lokasi sementara yaitu di bekas pabrik kayu. Dengan sistem izin sewa selama empat tahun.

"Dengan izin sewa tempat itu Rp 400 juta. Nah, tahun kelima ini ada perpanjangan, tapi belum saya bayarkan. Menunggu keputusan dari pihak kejaksaan untuk melakukan pengecekan izin sewanya. Kalau aman saya bayar tapi kalau tidak aman maka pedagang harus direlokasi," ujarnya. (kim-36)